

HAMBATAN *WORLD FOOD PROGRAMME* (WFP) DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PANGAN SUDAN SELATAN PASCA KEMERDEKAAN

Annisa Husna Daeng Nawier,

Email: Annisahusna698@gmail.com

Surwandono,

Email: Surwandono@umy.ac.id

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Hambatan *World Food Programme* (WFP) dalam menyelesaikan krisis pangan Sudan Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan WFP dalam menyelesaikan krisis pangan Sudan Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan fakta bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi hambatan WFP yaitu konflik politik pada pemerintahan Sudan Selatan, sulitnya akses pada beberapa daerah Sudan Selatan dan ketidakstabilan pendanaan.

Kata Kunci: WFP, Sudan Selatan, Krisis Pangan, Organisasi Internasional

ABSTRACT

This research discusses about The Obstacle of World Food Programme (WFP) in Resolving Food Crisis of South Sudan. The purpose of this research is to analyze and find out the factors of the obstacle of WFP to resolve food crisis in South Sudan. Based on the research that has been hold, the researcher found there are three factors that become obstacles to WFP, namely the political conflict in the government of South Sudan, the difficulty of access to some areas of South Sudan and the instability of funding.

Keywords: WFP, South Sudan, Food Crisis, International Organization

PENDAHULUAN

World Food Programme (WFP) adalah suatu lembaga internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan terbesar di dunia saat ini dengan fokus utama yaitu menangani tentang bahaya kelaparan. (Australian AID, 2012) WFP juga merupakan lembaga internasional yang dalam keadaan darurat sering kali menjadi wadah pertama yang memberikan bantuan makanan kepada para korban perang, konflik sipil, kekeringan, banjir, gempa bumi, angin topan, kegagalan panen dan bencana alam lainnya. Ketika keadaan darurat mereda, WFP membantu masyarakat membangun kembali kehidupan yang sebelumnya hancur akibat dari masalah-masalah yang terjadi. WFP bekerja untuk memperkuat ketahanan masyarakat yang terkena

dampak krisis yang berlarut-larut dengan menerapkan prinsip pembangunan dalam respons kemanusiaan. (World Food Programme, 2018)

WFP pertama kali dibentuk pada 24 November 1961 atas usulan Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Dwight Eisenhower dengan tujuan untuk memberikan bantuan makanan melalui sistem PBB dan FAO. WFP telah bekerja pada banyak negara di dunia yaitu sekitar 82 negara termasuk di Sudan Selatan. Pada tahun 1963, WFP untuk pertama kalinya meluncurkan program bantuan yang diberikan kepada Sudan. Tahun 1965 WFP dianggap sebagai salah satu program PBB yang paling lengkap karena kehadirannya dianggap layak, sukses dan berguna sebagai bantuan multilateral. (World Food Programme, 2018)

Salah satu prioritas utama WFP adalah *zero hunger* atau tanpa kelaparan. Menurut WFP memberantas kelaparan dan kekurangan nutrisi pada tubuh manusia adalah suatu tantangan yang besar pada zaman modern saat ini. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan dan bahaya kesehatan pada manusia, akan tetapi juga berpengaruh terhadap laju perkembangan pembangunan seperti pendidikan dan pekerjaan. Dengan bantuan makanan kemanusiaan, WFP memberikan makanan bergizi bagi orang-orang yang membutuhkan untuk menciptakan dunia tanpa kelaparan. Saat ini dunia telah berkontribusi besar dalam mengurangi kelaparan yang membuat jumlahnya menurun yaitu ada 216 juta jiwa yang kelaparan dengan angka yang cenderung lebih sedikit daripada tahun 1990-1992, meskipun terjadi peningkatan 1,9 miliar populasi dunia. (World Food Programme, 2018)

Pada tahun 2013 sampai 2017 Sudan Selatan mengalami bencana krisis pangan. Menurut *World Meters* yang diambil dari data terakhir PBB, pada tahun 2018 jumlah populasi penduduk Sudan Selatan adalah sebesar 12.830.007 penduduk. Populasi tersebut setara dengan 0,17% total populasi dunia. (Worldmeters, 2018) Sudan Selatan mencapai kemerdekaan pada 9 Juli 2011 dengan memisahkan diri dari negara Sudan utara dan menjadi negara termuda di dunia saat ini. (Varma, 2011) Kemerdekaan Sudan Selatan ini menutup perang saudara terpanjang di Kawasan Afrika. (Knopf, 2016) Sudan selatan meraih suara bulat untuk kemerdekaannya pada suatu referendum. Referendum tersebut dilakukan untuk memenuhi persyarat CPA. (Tadesse, 2012, p. 6) *The Comprehensive Peace Agreement (CPA)* adalah sekumpulan protokol yang ditandatangani pada bulan Januari 2005 antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dan pemerintah Sudan. Perjanjian tersebut difasilitasi dalam upaya regional oleh otoritas pembangunan antar pemerintah dan komunitas internasional yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia. Perjanjian dan kesepakatan tersebut memiliki tujuan untuk mengakhiri perang saudara II di Sudan. (Abedje, 2010) Referendum Sudan Selatan sendiri adalah salah satu hal penting dari CPA. Penandatanganan CPA di Nairobi Kenya membuat era baru dan harapan baru bagi Sudan Selatan. (Tadesse, 2012, p. 6) Setelah meraih kemerdekaan yang menandakan berpisahnya Sudan dan Sudan Selatan lantas tidak membuat konflik pada kawasan ini selesai begitu saja. Terjadi beberapa konflik internal antara kedua negara ini. Konflik tersebut antara lain seperti konflik minyak, konflik perbatasan dan konflik antar pemimpin. (Cahyanti, 2017, p. 87)

Sejarah masuknya WFP di Sudan Selatan telah ada sejak tahun 1963 ketika Sudan Selatan masih menjadi satu negara dengan Sudan Utara karena sebenarnya bencana tersebut telah terjadi jauh sebelum negara ini merdeka. Untuk itu, bantuan makanan sangat penting untuk menghindari bencana kemanusiaan di Sudan Selatan. WFP telah memberikan dukungan penyelamatan jiwa kepada jutaan orang di semua sisi konflik dan di hampir semua wilayah Sudan Selatan yang dapat diakses sejak kemerdekaan tahun 2011. Dengan tujuan mengubah bantuan pangan menjadi alat untuk pembangunan perdamaian dan pembangunan di masa depan, WFP melibatkan organisasi *Grassroots Civil Society Organizations* dan memberdayakan masyarakat dengan fokus khusus pada perempuan dan anak-anak untuk

mendorong peningkatan ketahanan dan kemandirian. Mitra WFP di Sudan Selatan termasuk PBB dan lembaga internasional lainnya, serta LSM lokal sebagai bagian dari upaya lokalisasi di bawah *Grand Bargain*. (World Food Programme, 2019)

Keterlibatan WFP di Sudan Selatan sendiri telah tercemrin dari bantuan-bantuan yang diberikan sejak negara ini mengalami konflik yang menimbulkan terjadi krisis pangan. WFP menjadikan Sudan Selatan sebagai negara darurat atau *South Sudan emergency*. Pada tahun 2017, WFP memberikan bantuan makanan kepada sekitar 4,8 juta rakyat Sudan Selatan. (World Food Programme, 2018) WFP memberikan bantuan transfer uang tunai dan pelatihan keterampilan dengan kelompok yang pertama sebanyak 1.700 orang. WFP juga menyediakan bantuan makanan dan nutrisi untuk 273.000 orang di 11 wilayah yang terkena dampak paling buruk dari masalah pangan. (World Food Programme, 2017) Pada tahun 2018, dengan melakukan 13 misi dan 15 misi berkelanjutan tim *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) WFP menyediakan bantuan makanan dan gizi untuk membantu 200.162 jiwa, termasuk 38.362 anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2018)

Melihat dari banyaknya bantuan yang telah diberikan WFP di Sudan Selatan, ironisnya jumlah rakyat Sudan Selatan yang mengalami karawanan pangan yang parah dari tahun 2017 hingga 2018 ternyata terus bertambah dari 4,8 juta (World Food Programme, 2017) menjadi 6,3 juta orang (World Food Programme, 2018). Dengan bertambahnya angka kerawanan pangan tersebut menandakan bahwa krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan terus berlanjut dan WFP masih tidak berhasil menyelesaikan krisis pangan di Sudan Selatan. Hal tersebut lantas terjadi karena terdapat beberapa hambatan yang membuat program dan bantuan yang diberikan WFP di Sudan Selatan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi WFP yang sebenarnya.

LANDASAN TEORI

1. Organisasi Internasional

Banyak negara yang membutuhkan organisasi internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi oleh negara. Menurut J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul "International Organization: Theories and Institutions" Organisasi Internasional merupakan organisasi antar pemerintahan yang inklusif. Organisasi yang inklusif dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan. (Barkin, 2006, p. 1) Sementara itu, menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional secara jelas yaitu:

"Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities".

Maksudnya adalah organisasi internasional terbentuk atas beberapa pengaturan kerja diantara negara bagian dengan kesepakatan dasar dan untuk melaksanakan fungsi melalui rapat rutin oleh berbagai staff dari seluruh dunia yang tergabung kedalam organisasi internasional tersebut. Secara tradisional, organisasi internasional disebut sebagai suatu lembaga formal yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. (Pease, 2009, p. 2)

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi internasional adalah suatu proses yang berkaitan dengan ruang lingkup perwakilan tiap-tiap wilayah negara dalam satu waktu tertentu yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan kompromi agar menciptakan kesejahteraan dan menyelesaikan suatu masalah. Untuk menjelaskan organisasi internasional, beliau juga menggambarkan ciri-ciri organisasi internasional yaitu permanen, memiliki instrumen dasar,

dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan persetujuan bersama bukan dipaksakan. (Suherman, 2003, p. 48)

Menurut Harold K. Jacobson, dalam bukunya yang berjudul “Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System” terdapat 5 fungsi dari suatu organisasi internasional diantaranya; (Jacobson, Harold K, 1979, pp. 89-90)

Pertama fungsi Informasi, fungsi ini melibatkan pengumpulan, analisis, pertukaran dan penyebaran data dan pendapat atau sudut pandang. Dalam hal ini organisasi dapat menggunakan stafnya untuk menjalankan fungsi ini dan mungkin hanya dapat menyediakan forum dimana perwakilan dari unit-unit yang berhak memilih dapat menjalankan fungsi ini. Kedua fungsi Normatif, fungsi ini melibatkan ketentuan dan pernyataan suatu standar norma. Fungsi ini tidak melibatkan hal-hal yang memiliki efek mengikat secara hukum, melainkan suatu pernyataan yang dibuat untuk mempengaruhi lingkungan dimana politik domestik dan dunia dilakukan. Ketiga fungsi Pembuatan Peraturan, fungsi ini juga melibatkan ketentuan dan pernyataan suatu standar norma, namun tujuannya adalah untuk menyusun hal-hal yang dapat memiliki efek mengikat secara hukum. Keempat fungsi Pengawasan, fungsi ini melibatkan upaya yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi mereka yang tunduk pada aturan tersebut. Fungsi ini dapat mencakup beberapa langkah, mulai dari ketika terdapat bukti bahwa telah terjadi suatu pelanggaran, kemudian bukti pelanggaran tersebut di verifikasi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dan kelima fungsi Operasional, fungsi ini melibatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, contohnya seperti terkait dengan bantuan keuangan dan bantuan pasukan militer.

Saat ini Organisasi internasional telah menjadi fenomena yang sangat terkenal dalam kehidupan internasional. (Martin & Simmons, 2002, p. 192) *World Food Programme* (WFP) adalah salah satu organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB. WFP adalah organisasi kemanusiaan terkemuka di dunia saat ini yang memerangi kelaparan di seluruh dunia, memberikan bantuan makanan dalam keadaan darurat dan bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan gizi dan membangun ketahanan. Saat ini WFP membantu 80 juta orang di sekitar 80 negara setiap tahunnya. (World Food Programme, 2018)

Bila dikaitkan dengan 5 fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson diatas, WFP melakukan fungsi-fungsi tersebut diantaranya; Pertama, fungsi informasi dalam hal ini WFP berhasil menjalankan fungsi ini dengan cara mengumpulkan data-data jumlah, kebutuhan, situasi terkini tentang bahaya kelaparan yang misalnya sedang melanda Sudan Selatan. Kedua, fungsi normatif dalam hal ini WFP telah membuat aturan-aturan atau norma serta prinsip-prinsip yang mempengaruhi dunia internasional dengan pernyataan yang dikeluarkannya. Akan tetapi, untuk mempengaruhi pemerintah negara dimana WFP melakukan program bantuan seperti yang terjadi di Sudan Selatan, WFP tidak mampu mempengaruhi pemerintahan domestik Sudan Selatan. Ketiga, fungsi pembuatan peraturan dalam hal ini fungsi ini bisa dikatakan sama dengan fungsi normatif dimana WFP tidak begitu berhasil dalam membuat aturan-aturan atau norma yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemerintahan domestik suatu negara dimana WFP sedang menjalankan bantuannya. Seperti yang terjadi di Sudan Selatan, WFP terikat dengan aturan-aturan dari pemerintah Sudan Selatan sehingga ketika pemerintah Sudan Selatan melakukan pelanggaran yang membuat beberapa staf atau relawan WFP menjadi korban akibat konflik sipil yang terjadi, WFP sulit untuk memberikan sanksi hukum. Keempat, fungsi pengawasan dalam hal ini karena fungsi pembuatan peraturan WFP di Sudan Selatan tidak baik maka WFP sangat sulit untuk melakukan fungsi ini dan hal ini juga diakibatkan oleh konflik sipil yang terus terjadi yang membuat pasukan militer pemerintah Sudan Selatan menghalangi relawan WFP untuk

memberikan bantuan pada beberapa wilayah di Sudan Selatan. Dan kelima, fungsi operasional dalam hal ini WFP mengatakan sampai sekarang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan Selatan karena dana yang dibutuhkan tidak sesuai dana yang didapatkan.

2. *Food Security*

Istilah ketahanan pangan pertama kali muncul di PBB pada tahun 1971 untuk menciptakan dunia bebas dari krisis, terutama pada negara berkembang dari krisis produksi dan krisis pemasok makanan pokok. Tujuan utama menciptakan ketahanan pangan pada masa itu terletak pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: (Pieris, 2015, p. 2)

“Food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster”.

Pada *World Food Summit* 1996, dijelaskan bahwa Ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana jika orang-orang, setiap saat, memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan yang baik dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Terdapat empat dimensi yang didalamnya memuat beberapa indikator utama yang dapat mengidentifikasi ketahanan pangan sebagai berikut: (FAO, 2008, p. 1)

1. Ketersediaan fisik makanan (Availability)
Ketersediaan pangan terkait dengan aspek persediaan keamanan pangan dan ditentukan oleh tinggi rendahnya produksi pangan, persediaan dan perdagangan secara keseluruhan.
2. Akses ekonomi dan fisik makanan (Access)
Persediaan makanan yang ada pada level nasional atau internasional tidak dapat dikatakan bisa memenuhi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Masalah-masalah yang akan dihadapi tentang akses pangan yang tidak baik dapat menghasilkan peningkatan fokus kebijakan pada pemasukan, pengeluaran, pasar dan harga untuk dapat mencapai tujuan ketahanan pangan. Hal ini juga terkait dengan kekurangan gizi dan kerawanan pangan.
3. Pemanfaatan pangan (Utilization)
Pemanfaatan pangan dapat diartikan sebagai cara tubuh membuat sebagian besar berbagai nutrisi dalam makanan. Energi yang cukup dan asupan nutrisi oleh individu adalah hasil dari kerja keras yang baik dan praktik pemberian makan, persiapan makanan, berbagai diet dan distribusi makanan di dalam rumah tangga. Dengan pemanfaatan secara biologis yang baik terhadap makanan yang dikonsumsi, dapat menentukan status gizi individu masyarakat.
4. Stabilitas dari tiga dimensi diatas (Stability)
Ketika asupan makanan saat ini dapat tercukupi, namun hal ini masih dianggap tidak menjamin seseorang aman terhadap pangan karena jika seseorang memiliki akses yang tidak baik pada makanan secara terus-menerus, maka akan memperburuk status gizi seseorang. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (pengangguran, kenaikan harga pangan) dapat juga berdampak pada status ketahanan pangan seseorang bahkan suatu negara.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan maka empat indikator diatas harus tercapai dan dipenuhi secara bersamaan. Jika tidak tercapai secara bersamaan maka akan berdampak pada terjadinya kerawanan pangan/krisis pangan.

Sudan selatan sebagai negara yang termuda di dunia saat ini dihantui dengan terjadi gejalak krisis pangan didalam negara. Krisis pangan tersebut terjadi karena tidak adanya *food security* atau ketahanan pangan pada negaranya. Bila dilihat dari empat dimensi yang dijelaskan FAO diatas Sudan selatan sangat jelas tidak memiliki ketahanan pangan yang baik. Pertama, terkait dengan ketersediaan fisik makanan, masyarakat Sudan selatan saat ini sulit melakukan produksi pertanian sehingga membuat ketersediaan pangan disana rendah yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca buruk yang cenderung terus-menerus hujan dan membuat hasil produksi juga menurun. Kedua, terkait dengan akses ekonomi dan fisik makanan, pada dasarnya dimensi ini berhubungan degan ketersediaan fisik yang sudah dijelaskan yaitu Sudan selatan memiliki akses pangan yang sulit yang tidak menjamin ketahanan pangan pada rumah tangga. Ketiga, terkait dengan pemanfaatan pangan, banyak rakyat Sudan selatan mengalami gizi buruk karena energi dan asupan nutrisi dari pemanfaatan makanan yang dikonsumsi tidak bergizi dan tidak sehat. Dan keempat, terkait dengan stabilitas dalam negara itu sendiri, misalnya saja kondisi cuaca buruk di Sudan Selatan, Ketidakstabilan politik antara para pemimpin negara, kenaikan harga pangan juga membawa dampak buruk bagi status ketahanan pangan Sudan Selatan.

Untuk menjelaskan ketahanan pangan Sudan Selatan setelah adanya bantuan *World Food Programme* (WFP), maka bisa dilihat pada laporan situasi yang dikeluarkan oleh WFP setiap tahunnya. Pada Oktober-Desember 2017 dan Februari-April 2018 terjadi peningkatan kerawanan pangan yang cukup signifikan yaitu naik dari 4,8 juta orang (World Food Programme, 2017) menjadi 6,3 juta orang (World Food Programme, 2018). Dapat disimpulkan bahwa, ketika terjadinya kerentanan pangan seperti kasus yang terjadi pada Sudan Selatan, yang menunjukan terjadinya peningkatan kerawanan pangan. hal tersebut berarti bahwa empat indikator/dimensi yang menciptakan ketahanan pangan belum tercapai bahkan setelah munculnya bantuan dari *World Food Programme* (WFP).

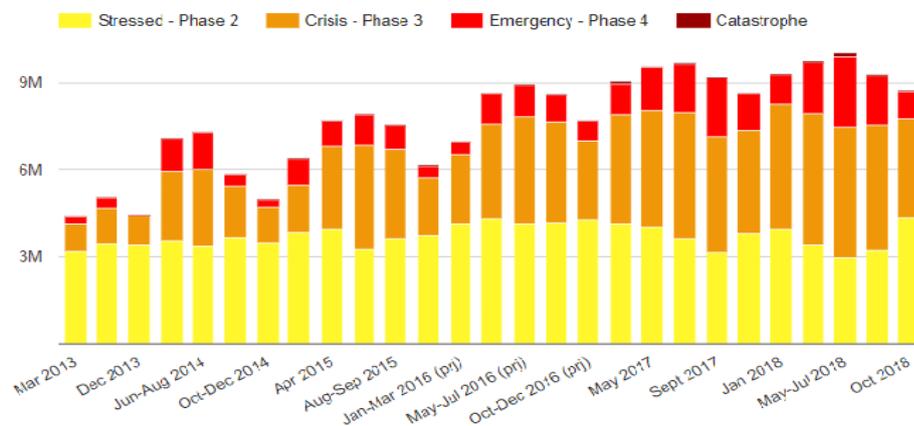
PEMBAHASAN

Masalah Pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaan

Pangan menjadi salah satu instrumen paling rentan di dunia internasional saat ini. Setiap harinya diseluruh negara di dunia, pangan muncul sebagai masalah yang lebih beraneka ragam. Masalah-masalah tersebut muncul saat suatu negara atau rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai contoh, Sudan Selatan muncul sebagai negara termuda di dunia dan negara yang memiliki masalah pangan terburuk di dunia. PBB telah mengumumkan bahwa akan terjadi suatu gejalak yang sangat besar di wilayah ini. Kelaparan muncul sebagai masalah pangan yang membuat negara ini terus mengalami kondisi gizi buruk dan menelan banyak korban jiwa. Sampai saat ini, dukungan terus muncul dengan diberikannya bantuan dari dunia internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kondisi pangan Sudan Selatan sebelum munculnya *World Food Programme* (WFP)

Gambar 3.4
Krisis Sudan Selatan



Sumber: *Crisis in South Sudan*. Pada Website *Food and Agriculture Organization of The United Nations*. (2018)

Gambar diatas memperlihatkan tentang populasi Sudan Selatan berdasarkan perhitungan oleh IPC dalam beberapa fase yaitu fase *stressed* (ditandai dengan warna kuning), fase *crisis* (ditandai dengan warna orange), fase *emergency* (ditandai dengan warna merah) dan *catastrophe* (ditandai dengan warna coklat). Bila kita lihat, terjadi ketidakstabilan populasi yang membawa angka populasi Sudan Selatan di berbagai wilayah cenderung turun maupun naik dari tahun ke tahun berdasarkan fase *stressed*, *crisis*, *emergency* dan *catastrophe*. Populasi ini jelas dipengaruhi oleh kondisi dari pangan yang ada di Sudan Selatan

Berdasarkan empat dimensi yang didalamnya terdiri dari beberapa indikator ketahanan pangan yang dijelaskan oleh FAO yaitu *Availability*, *Access*, *Utilization* dan *Stability*, secara tidak langsung dapat digambarkan bagaimana kondisi pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaannya. Pertama, *Availability* atau ketersediaan fisik makanan dan *Access* atau akses ekonomi dan fisik makanan, dimana produksi pertanian Sudan Selatan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan Mata pencaharian dan ketahanan pangan hingga 90% rakyat Sudan Selatan hidup bergantung pada pertanian, perikanan atau pemeliharaan ternak. Sektor pertanian merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan perdamaian Sudan Selatan, namun saat ini Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami kondisi pangan paling buruk di dunia. Pada Februari 2017, PBB mengumumkan bahwa telah terjadi bencana kelaparan yang besar di Sudan Selatan. Lebih dari separuh rakyat Sudan Selatan tidak aman pangan menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), yang memperkirakan 6,1 juta orang mengalami krisis atau tingkat ketidakamanan pangan yang lebih buruk pada Agustus-September 2018. Pemandangan populasi massal, perlambatan ekonomi dan kondisi iklim yang buruk seperti kekeringan dan banjir hanya akan lebih memperburuk situasi Sudan Selatan. (United States Agency for International Development , 2018)

Kedua, *Utilization* atau pemanfaatan pangan, dimana masyarakat Sudan Selatan mengalami masalah gizi buruk yang tinggi karena tidak adanya pemanfaatan makanan yang bernutrisi sehingga tidak menunjang tercukupinya asupan makanan yang bergizi bagi masyarakat Sudan Selatan. Sebanyak 30% rakyat Sudan Selatan kekurangan gizi akut (Suastha, 2017).

Dan ketiga, *Stability* atau stabilitas, dimana terkait dengan kondisi politik, kondisi cuaca, dan masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran dan meningkatnya harga pangan.

Pada wilayah Sudan Selatan sendiri sangat jelas telah terjadi ketidakstabilan politik yang merupakan penyebab paling utama memburuknya kondisi pangan. Konflik terus terjadi antara para pemimpin Sudan Selatan yang membawa kondisi dalam negara terus memburuk. Sejak Desember 2013, panen petani terpaksa tidak berjalan lagi karena konflik yang terjadi. Hal tersebut kemudian terus memburuk dengan terjadinya inflasi yang mencapai 800% dan menyebabkan meningkatnya harga impor pangan (Suastha, 2017). Konflik dan harga minyak internasional yang lebih rendah mendorong kondisi makroekonomi yang sangat buruk di Sudan Selatan. Sebelum terjadi konflik pada tahun 2013, Produksi minyak, ekspor utama Sudan Selatan, diperkirakan mencapai 130.000 barel/ hari, turun dari 160.000 barel/hari pada awal 2017 dan 350.000 barel/hari. Dengan sumber pendapatan alternatif yang terbatas, pendapatan mata uang asing telah berkurang lebih jauh dari pra-Juli Level 2016. Akibatnya, South Sudanese Pound (SSP) semakin menurun terhadap Dolar Amerika Serikat di pasar paralel, dari 76 SSP/USD pada Oktober 2016 menjadi 182 SSP/ USD pada Oktober 2017. (Famine Early Warning Systems Network, 2017)

Kondisi pangan Sudan Selatan pasca masuknya bantuan (*World Food Programme*) WFP

Untuk melihat situasi atau kondisi permasalahan pangan Sudan Selatan pasca munculnya *World Food Programme* (WFP), dapat dijelaskan berdasarkan data/dokumen yang dirilis oleh WFP dalam websitenya tentang laporan situasi Sudan Selatan. Data ini diambil pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Dimana, pada tahun 2017 bencana kelaparan diumumkan PBB dan bantuan dari WFP mulai terus masuk di Sudan Selatan sampai tahun 2018.

Pada tahun 2017, tepatnya Januari-April 2017 jumlah rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan makanan sekitar 4,6 juta jiwa. WFP memberikan bantuan transfer uang tunai dan pelatihan keterampilan dengan kelompok yang pertama sebanyak 1.700 orang. WFP juga menyediakan bantuan makanan dan nutrisi untuk 273.000 orang di 11 wilayah yang terkena dampak paling buruk dari masalah pangan. (World Food Programme, 2017) Pada Mei-July 2017 jumlah rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan makanan atau menghadapi krisis pangan terus bertambah sebanyak 5.5 juta jiwa. Hingga akhir April, WFP membantu 1,8 juta jiwa dengan mendistribusikan makanan, selimut atau pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil atau menyusui serta makanan untuk program pendidikan. 7 mekanisme *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) yang dijalankan di negara-negara bagian Upper Nile, Unity dan Jonglei, telah menyediakan 2.100 mt bantuan makanan yang dapat menyelamatkan 112.600 jiwa yang didalamnya terdiri atas 23.400 anak-anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2017) Menariknya, data/dokumen pada Agustus 2017 menjelaskan sekitar 6 juta jiwa rakyat Sudan Selatan mengalami krisis pangan dari Juni-Juli 2017. (World Food Programme, 2017) Angka ini ternyata terus bertambah dengan terus diikuti dengan pengiriman bantuan. Dan pada akhir 2017, Oktober-Desember ternyata angka krisis pangan ini mulai menurun sekitar 4.8 juta jiwa. Untuk rentan waktu setahun pada 2017 secara keseluruhan sudah 4.8 juta jiwa dibantu oleh WFP, walaupun jumlah rakyat yang mengalami krisis tidak stabil dari rentan beberapa bulan. (World Food Programme, 2017)

Pada tahun 2018, Januari-Maret jumlah rakyat Sudan yang mengalami kondisi pangan buruk atau krisis pangan bertambah cukup banyak dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.1 juta jiwa. Dengan melakukan 13 misi dan 15 misi berkelanjutan tim *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) menyediakan bantuan makanan dan gizi untuk membantu 200.162 jiwa, termasuk 38.362 anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2018) Pada data yang dikeluarkan WFP maret 2018, ternyata February-April 2018 jumlah krisis pangan bertambah menjadi 6.3 juta jiwa. (World Food Programme, 2018) Dan hingga Mei-Juli 2018 jumlah rakyat yang mengalami krisis pangan bertambah besar menjadi 7.1 juta jiwa. (World Food Programme, 2018)

Pada akhirnya, bila dilihat dari situasi terkini Sudan Selatan yang dilaporkan *World Food Programme* (WFP), kondisi pangan Sudan Selatan hingga tahun 2018 masih mengalami krisis pangan atau ketidakamanan pangan yang cukup tinggi. Meskipun bantuan-bantuan WFP terus dilancarkan, hal tersebut tidak mampu memulihkan kondisi pangan yang terjadi di Sudan Selatan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN *WORLD FOOD PROGRAMME* (WFP) DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PANGAN SUDAN SELATAN

A. Ketidakstabilan Politik Pemerintah Sudan Selatan

Terdapat beberapa konflik yang pada dasarnya konflik ini diakibatkan oleh terjadinya ketidakstabilan politik pada pemerintahan Sudan Selatan, konflik tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Konflik Minyak

Terkait konflik minyak yang dipicu pasca pemisahan kedua negara. Muncul rasa ketidaksukaan Sudan terhadap Sudan Selatan karena ladang minyak sebagian besar berada di Kawasan Sudan Selatan. Pada Kawasan Sudan Selatan terdapat beberapa perusahaan minyak yang beroperasi seperti Petrodar, GNPOC, dan *White Nile Petroleum Operating Company* (WNPOC)/Thar), sedangkan pada kawasan Sudan Utara hanya terdapat satu perusahaan minyak yang beroperasi yaitu *Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company* (GNPOC). (Cahyanti, 2017, p. 87)

b. Konflik Perbatasan

Konflik perbatasan ini melibatkan wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru, dan kota Abyei (Cahyanti, 2017). Wilayah Kordofan Selatan tepatnya di ladang minyak Heglig, dikendalikan oleh Sudan Utara. *Greater Nile Oil Project* (GNOP) merupakan salah satu perusahaan minyak yang diproduksi di Heglig pada tahun 1996. Heglig dan Unity adalah proyek ladang minyak terbesar di kawasan ini. Akan tetapi, Unity sebenarnya adalah salah satu negara bagian dari Sudan Selatan dan disebut juga Nil Atas Barat yang berada di perbatasan Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Hingga pada akhirnya perebutan wilayah ini terus terjadi dengan dikerahkannya pasukan Juba yang menduduki pusat perekonomian Sudan Utara dan mengklaim bahwa Heglig merupakan bagian dari Warrap. (Kompas.com, 2012)

c. Konflik Pemimpin Pemerintahan

Konflik ini terjadi pada internal di Sudan Selatan antara Presiden Salva Kiir dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Konflik ini terjadi karena tuduhan oleh Machar yang menentang kepemimpinan Presiden Kiir yang belum bisa membawa Sudan Selatan menjadi negara damai, aman dan tentram. Salva Kiir juga menuduh Riek Machar ingin mengkuudeta pemerintahannya (Cahyanti, 2017, p. 88)

A. Keterbatasan Akses Wilayah Sudan Selatan

Keterbatasan akses ini berkaitan dengan sulitnya akses jalan bagi *World Food Programme* (WFP) dalam menjangkau beberapa daerah yang mempunyai akses jalan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi serta konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Karena Sudan Selatan merupakan kawasan yang beriklim tropis maka curah hujannya relatif tinggi. Menurut Rene McGuffin karena terjadinya musim hujan, pengiriman bantuan melewati darat sulit untuk dilakukan dan akibat hujan ini menyebabkan tersebarnya penyakit di antara warga Sudan Selatan yang mengungsi dari rumahnya masing-masing (VOA Indonesia, 2012) Untuk itu, bantuan dikirim melalui jalur udara karena hujan yang membuat sekitar 70 persen akses darat

tidak dapat diakses. Adham Effendi selaku kepala logistik untuk WFP di Sudan Selatan mengatakan; (Widuri, 2018)

“Kami sudah berada di tengah-tengah musim hujan dan sekitar 70 persen dari negara itu tidak dapat diakses, dan sebagai hasilnya, kami harus bergantung terutama pada cara-cara inovatif pengiriman kargo,”

Disamping karena curah hujan yang tinggi di Sudan Selatan sehingga membuat akses jalan sulit dilalui, telah terjadi beberapa insiden seperti pemberontakan oleh pasukan pemerintah, pembajakan bantuan makanan dan memblokir akses para pekerja kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan pada beberapa daerah di Sudan Selatan. (Widuri, 2018) Setidaknya 80 kali sebulan, menurut penghitungan PBB, pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak menolak izin untuk pesawat lepas landas ketika membawa makanan darurat atau bantuan medis, atau mereka menolak akses ke seluruh kota. Kelompok-kelompok kemanusiaan mengetahui bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan memerlukan lisensi US\$ 10.000 untuk setiap pekerja bantuan asing di negara itu. (Sieff, 2017) Hal ini semakin mempersulit bantuan untuk masuk di Sudan Selatan. Padahal telah terjadi kelaparan yang sangat besar pada hampir semua wilayah Sudan Selatan, akan tetapi seolah-olah pemerintah bekerjasama dengan pasukan pemberontak untuk menghalang-halangi masuknya bantuan di Sudan Selatan.

A. Ketidakstabilan pendanaan

Pendanaan *World Food Programme* (WFP) berasal dari bantuan *Governments*, *Corporations* dan *Individuals*. Dana dan donor yang berasal dari *governments* adalah sumber dana utama WFP yang terdiri atas lebih dari 60 pemerintah yang berkontribusi dalam program kemanusiaan dan pembangunan dunia (World Food Programme, 2018). Dana dari pemerintah ini biasanya dalam bentuk uang tunai yang diberikan langsung kepada WFP untuk membantu negara lain dalam beberapa masalah atau konflik yang sedang terjadi. Kedua, pendanaan dan donor yang berasal dari *corporations* adalah dana yang berupa uang, produk, layanan, dan perusahaan dapat melibatkan para karyawan dan pelanggannya dalam beberapa misi vital untuk menyelamatkan jiwa. (World Food Programme, 2018) WFP bekerja dengan perusahaan dan yayasan utama yang berkomitmen untuk mencari solusi jangka panjang untuk mengakhiri kelaparan. Mitra Kemanusiaan Global WFP berinovasi bersama untuk menemukan solusi unik dan skalabel yang memiliki dampak nyata terhadap orang-orang yang membutuhkan. Suatu perusahaan tahu bahwa dengan berinvestasi dalam *zero hunger* dapat menciptakan dunia yang lebih aman, lebih sejahtera di mana 7 miliar orang dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam ekonomi global dan menyadari potensinya masing-masing. (World Food Programme, 2018)

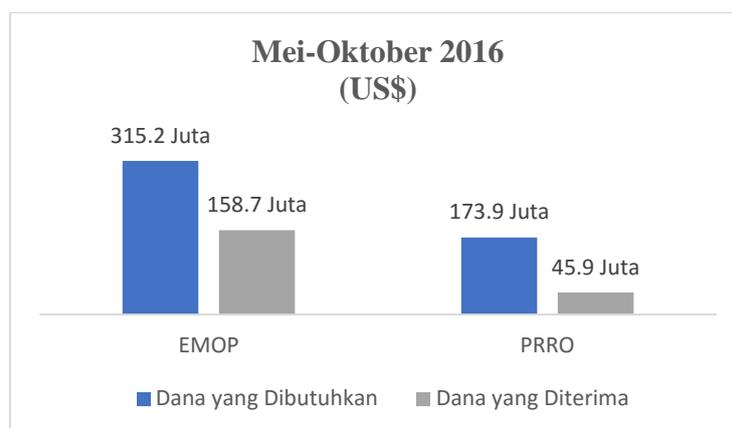
Dan pendanaan dan donor yang berasal dari *individuals* adalah bantuan dana berupa uang dan makanan. Menurut WFP, ketika satu individu saja mendonasikan US\$15 dapat memberikan pasokan makanan selama 1 bulan kepada anak yang lapar. (World Food Programme, 2018)

WFP didanai sepenuhnya oleh sumbangan sukarela (Voluntary donations). (United Nations Global Marketplace, 2018) Dana sukarela ini berasal dari pemerintah, perusahaan dan individu (World Food Programme, 2014) seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pendanaan yang berbasis sukarela ini dapat dibuktikan dengan beberapa berita dan dokumen yang dikeluarkan WFP dalam website resimnya. Salah satu berita diantaranya yang dikeluarkan WFP menyebutkan bahwa, WFP merupakan lembaga yang didanai sepenuhnya oleh sumbangan sukarela, sebagai contoh dimana WFP membutuhkan US\$ 88 juta untuk operasinya di Irak dari Juli hingga Desember 2014, sehingga WFP memerlukan donor dari negara lain untuk membantu mengatasi masalah di Irak (World Food Programme, 2014).

Untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang terjadinya ketidakstabilan pendanaan WFP di Sudan Selatan, penulis mengambil contoh pada tahun 2016, 2017 dan 2018 terkait bantuan donor yang diterima oleh Sudan Selatan dari WFP. Pertama, pada Januari hingga Maret tahun 2016 terdapat sekitar 2,8 juta orang Sudan Selatan dalam keadaan darurat atau krisis pangan tidak aman menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2016). Pada April 2017 WFP hanya dapat membantu 1.53 juta orang Sudan Selatan, yang berarti bahwa hanya setengah dari orang Sudan Selatan yang terkena krisis pangan dapat dibantu oleh WFP. Selanjutnya, untuk menangani masalah darurat di Sudan Selatan tersebut, berdasarkan EMOP dan PRRO WFP membutuhkan total persyaratan pendanaan sekitar US\$ 315.2 juta, akan tetapi dana yang berhasil terkumpul pada Mei-Oktober 2016 hanya 50% atau sebesar US\$ 158.7 juta. Untuk bantuan berkepanjangan dan operasi pemulihan pada Mei-Oktober 2016 total persyaratan pendanaan yang dibutuhkan WFP sekitar US\$ 173.9 juta, akan tetapi dana yang berhasil terkumpul hanya 26% atau sebesar US\$ 45.9 juta. Dengan beberapa perinciannya antara lain yaitu untuk logistik membutuhkan dana sekitar US\$ 71 juta, dengan dana yang terkumpul sebesar US\$ 50.8 juta. Layanan kemanusiaan udara membutuhkan dana sekitar US\$ 117.9 juta, dengan dana yang terkumpul sebesar US\$ 68.6 juta. Dan untuk telekomunikasi darurat membutuhkan dana sekitar US\$ 663,000, dengan dana yang terkumpul sebesar US\$ 250,000. (World Food Programme, 2016)

Grafik 4.1

Dana Berdasarkan *Emergency Operation* (EMOP) dan *Protracted Relief & Recovery Operation* (PRRO) Sudan Selatan Tahun 2016

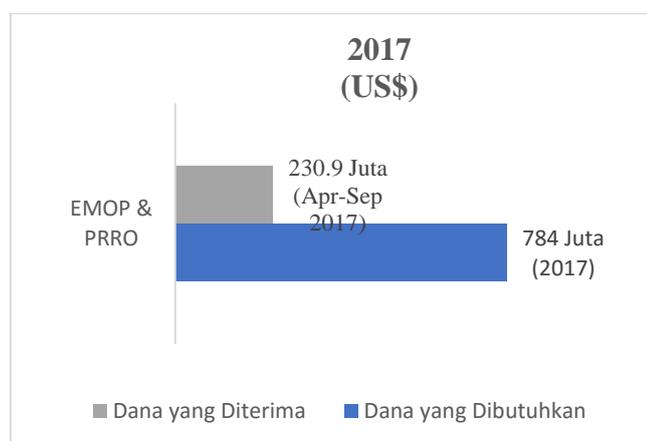


Kedua, pada Februari-April 2017 sekitar 4,9 juta orang Sudan Selatan menghadapi ketidakamanan pangan yang parah menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2017). Untuk menangani masalah tersebut, berdasarkan EMOP dan PRRO tahun 2017 WFP membutuhkan sekitar US\$ 784 juta, akan tetapi kontribusi yang mengkonfirmasi donornya hanya sebesar US\$ 128.1 juta atau hanya 16% yang berhasil didanai dengan total dana yang diterima dari April-September 2017 sebesar US\$ 230.9 Juta.

Dengan beberapa perinciannya antara lain yaitu untuk operasi khusus konstruksi jalan pengumpulan dana yang berhasil terkumpul hanya sebesar US\$ 1 juta, dengan persyaratan dana yang dibutuhkan awal sekitar US\$ 25 juta. untuk layanan kemanusiaan udara dana yang berhasil terkumpul sebesar US\$ 22 juta, dengan persyaratan dana yang dibutuhkan awal sekitar US\$ 58 juta. Untuk dana ketahanan pangan dan mata pencaharian berhasil terkumpul sebesar US\$ 230.3 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US\$ 689.5 juta. Dan untuk dana logistik yang berhasil terkumpul sebesar US\$ 14.6 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US\$ 27 juta. Total dana yang tadi terkumpul US\$ 128.1 juta hanya dapat membantu 1.5 juta orang, dengan target awal 2.7 juta orang. (World Food Programme, 2017)

Grafik 4.2

Dana Berdasarkan *Emergency Operation* (EMOP) dan *Protracted Relief & Recovery Operation* (PRRO) Sudan Selatan Tahun 2017



Pada tahun 2017 saat diperlukannya US\$ 1,4 miliar untuk pengungsi Sudan Selatan, *Executive Director* WFP yaitu David Beasley menyatakan bahwa: (UNHCR, 2017)

“Our funding situation forced us to cut food rations for many refugees in Uganda,”

dan lebih lanjut Beasley menjelaskan bahwa:

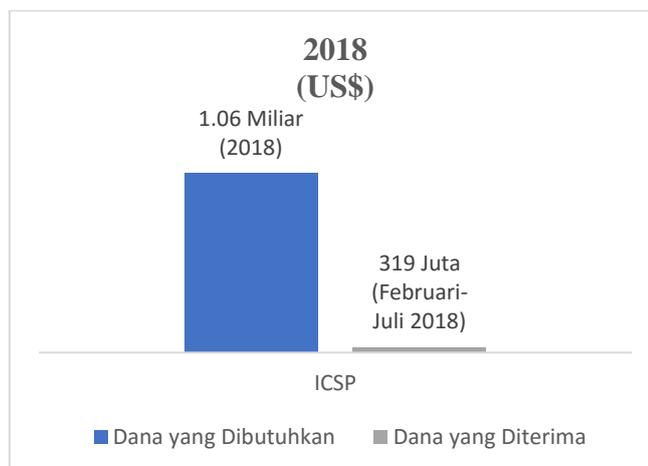
“I find that unacceptable, and I hope you do too. These are families like yours and mine, our brothers and sisters, and the world must help them now – not later. Please help us do the job these people need us to do”

Dengan pernyataan tersebut menandakan bahwa WFP benar-benar tidak dapat menolong pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan di Uganda, karena situasi pendanaan WFP yang tidak mencukupi sehingga memaksanya untuk memotong jatah makanan bagi para pengungsi. Hal tersebut akan semakin memperburuk keadaan krisis pangan rakyat Sudan Selatan.

Ketiga, pada Januari-Maret 2018 sekitar 5,1 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2018). Untuk menangani masalah tersebut, WFP membutuhkan dana sekitar US\$ 1.06 miliar pada tahun 2018, dengan total dana yang terkumpul pada Februari-Juli 2018 hanya sebesar US\$ 319 juta. Dengan salah satu perinciannya antara lain yaitu untuk dana ketahanan pangan dan mata pencaharian berhasil terkumpul sebesar US\$ 467.2 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US\$ 689.5 juta. (World Food Programme, 2018)

Grafik 4.3

Dana Berdasarkan *Interim Country Strategic Plan* (ICSP) Sudan Selatan Tahun 2018



Target atau dana awal dengan dana yang terkumpul diatas menunjukkan bahwa bantuan yang masuk di Sudan Selatan masih sangat rendah. Banyak dari dana yang terkumpul tidak dapat menolong jutaan jiwa rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan bantuan, karena dana yang masuk pada WFP tidak memenuhi syarat dana yang dibutuhkan oleh Sudan Selatan. Hal ini terjadinya ketidakstabilan dana karena komitmen negara anggota WFP dalam memberikan dana di Sudan Selatan tidak baik, dimana pada tahun 2015/2016 hanya ada 13 negara yang memberikan donornya kepada Sudan Selatan (World Food Programme, 2016). Sementara itu pada tahun berikutnya yaitu 2017 ada beberapa negara yaitu seperti china, Qatar dan Korea Selatan yang sebelumnya di tahun 2016 memberikan donor kemudian di tahun 2017 negara tersebut tidak lagi memberikan donornya (World Food Programme, 2017).

Bila dilihat dari tahun 2016 hingga Januari 2018 jumlah rakyat Sudan Selatan yang mengalami masalah ketidakamanan pangan pun terus bertambah yaitu dari yang hanya sekitar 2,8 juta orang di tahun 2016 naik menjadi 5,1 juta orang di tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa bantuan yang diberikan WFP masih sangat rendah dan tidak stabil sehingga menghambat jalannya program WFP dalam menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan Selatan. Memang bantuan WFP dapat membantu mengatasi sebagian atau beberapa masalah pangan di Sudan Selatan, akan tetapi bantuan yang diberikan WFP hanya dapat menolong rakyat Sudan Selatan pada jangka pendek saja. Padahal untuk menyelesaikan masalah pangan atau krisis pangan di Sudan Selatan dibutuhkannya dana yang sangat besar agar masalah yang terselesaikan bisa berjangka panjang dan terselesaikan.

KESIMPULAN

World Food Programme (WFP) adalah lembaga khusus PBB yang bekerjasama dengan FAO untuk mencapai tujuan menciptakan dunia tanpa kelaparan. WFP memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, tenaga medis, pakaian dan bantuan-bantuan terkait. Dengan bantuan ini diharapkan masalah-masalah terkait pangan dapat terselesaikan, contohnya mengenai masalah ketahanan pangan dan krisis pangan yang sedang dihadapi beberapa negara di dunia.

Sudan Selatan muncul sebagai negara termuda di dunia sekaligus negara yang sedang mengalami krisis pangan. Krisis pangan ini disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi politik yang memperburuk kondisi ekonominya. Hampir seluruh rakyat Sudan Selatan mengalami

kelaparan yang cukup tinggi. Dan banyak dari rakyat Sudan Selatan memilih untuk keluar dari wilayah Sudan Selatan untuk mencari perlindungan dan agar dapat bertahan hidup.

Muncul bantuan dari *World Food Programme* (WFP) untuk membantu negara Sudan Selatan keluar dari krisis pangan yang terjadi. WFP menjadikan Sudan Selatan sebagai negara operasi dengan level *Emergency South Sudan*. Bantuan diberikan melalui jalur darat, laut, udara yang dapat dijangkau oleh WFP dan bantuan ini berupa makanan pokok, obat-obatan, tenaga medis, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Sudan Selatan. Akan tetapi bantuan yang diberikan pada kenyataannya tidak mampu membuat jumlah rakyat yang mengalami ketidakamanan pangan atau krisis pangan menjadi berkurang. Dengan bertambahnya angka kerawanan pangan tersebut menandakan bahwa krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan terus berlanjut dan WFP masih tidak berhasil menyelesaikan krisis pangan di Sudan Selatan. Hal tersebut terjadi karena terdapat tiga fungsi organisasi internasional yang tidak berjalan diantaranya fungsi pembuatan peraturan terkait dengan bagaimana WFP tidak dapat membuat peraturan yang dapat mengikat Sudan Selatan. Kedua, fungsi pengawasan pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pembuatan peraturan dimana ketika WFP tidak dapat membuat peraturan yang mengikat maka WFP tidak dapat mengawasi tindakan-tindakan yang melanggar prinsip WFP. Dan fungsi operasional terkait dengan ketersediaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membuktikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menghambat WFP dalam menjalankan fungsi organisasi internasional khususnya pada krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan yaitu faktor politik dimana diakibatkan oleh terjadi konflik yang terjadi pada pemerintahan domestik Sudan Selatan. Kedua, faktor akses wilayah yang sulit dijangkau oleh WFP karena curah hujan yang tinggi serta pasukan pemberontak bahkan pemerintah melarang bantuan masuk pada beberapa daerah. Dan faktor terakhir terkait dengan pendanaan WFP yang tidak stabil karena dana yang didapatkan untuk Sudan Selatan tidak memenuhi dana yang dibutuhkan akibat dari sistem pendanaan yang hanya bersifat *voluntary*.

REFERENCES

- Abedje, A. (2010, Desember 30). *Sudan's Comprehensive Peace Agreement*. Retrieved from Voanews: <https://www.voanews.com/a/sudans-comprehensive-peace-agreement-cpa-112719954/157128.html>
- Australian AID. (2012, March 14). *Australian Multilateral Assessment March 2012: World Food Programme (WFP)*. Retrieved from Australian AID: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/wfp-assessment.pdf>
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Algrave Macmillan.
- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan . *Journal of International Relations*.
- Famine Early Warning Systems Network. (2017, October). *South Sudan*. Retrieved from Famine Early Warning Systems Network: <http://fews.net/east-africa/south-sudan/food-security-outlook/october-2017>
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Retrieved from Food and Agriculture Organization: <http://www.fao.org/docrep/013/a1936e/a1936e00.pdf>
- Jacobson, Harold K. (1979). *Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System*. New York: Alfred A. Knopf Inc.

- Knopf, K. A. (2016). *Ending South Sudan's Civil War*. New York: Council on Foreign Relations.
- Kompas.com. (2012, April 22). *Konflik yang Tiada Berakhir*. Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2012/04/22/01574530/Konflik.yang.Tiada.Berakhir>
- Martin, L. L., & Simmons, B. A. (2002). *International Organizations and Institutions*. California: Handbook of International Relations.
- Pease, K.-K. S. (2009). *International Organization Perspectives On Governance In The Twenty-First Century*. New York: Longman Publishing Group.
- Pieris, K. W. (2015). Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender (Woman In Development). *Jurnal Hubungan Internasional* .
- Sieff, K. (2017, March 31). *South Sudan's people are starving, and fighters are blocking aid*. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/africa/south-sudans-people-are-starving-and-fighters-are-blocking-aid/2017/03/31/69ef31c2-0f60-11e7-aa57-2ca1b05c41b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.9f95c4b1e870
- Suastha, R. D. (2017, February 21). *Perang Berkepanjangan, Sudan Selatan Dilanda Kelaparan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170220170159-127-194772/perang-berkepanjangan-sudan-selatan-dilanda-kelaparan>
- Suherman, A. M. (2003). *Organisasi Internasional & Intergrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwardi, S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Tadesse , D. (2012). Post-Independence South Sudan: the challenges ahead . *ISPI Working Paper*.
- UNHCR. (2017, May 15). *Over US\$1.4 billion needed for South Sudan refugees in 2017*. Retrieved from UNHCR: <https://www.unhcr.org/news/press/2017/5/591966294/us14-billion-needed-south-sudan-refugees-2017.html>
- United Nations Global Marketplace . (2018, December 7). *World Food Programme*. Retrieved from United Nations Global Marketplace : <https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WFP>
- United States Agency for International Development . (2018, September 30). *Food Assistance Fact Sheet - South Sudan*. Retrieved from United States Agency for International Development : <https://www.usaid.gov/south-sudan/food-assistance>
- Varma, A. (2011). The Creation of South Sudan: Prospects and Challenges. *ORF Occasional Paper*, 1.
- VOA Indonesia. (2012, August 3). *Program Pangan Dunia akan Jatuhkan Bantuan Pangan di Sudan Selatan*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/wfp-akan-jatuhkan-bantuan-pangan-di-sudan-selatan/1454228.html>
- Widuri, L. I. (2018, July 31). *Perjuangan PBB Salurkan Bantuan Makanan untuk Sudan Selatan saat Akses Terputus Banjir*. Retrieved from Kbk News:

<http://www.kbknews.id/2018/07/31/perjuangan-pbb-salurkan-bantuan-makanan-untuk-sudan-selatan-saat-akses-terputus-banjir/>

World Food Programme. (2016, May 19). *Emergency Dashboard - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp284084.pdf?_ga=2.161029053.1673290158.1544358130-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2014, September 16). *News Philippines: World Food Programme Clarification On Yolanda Response Funds*. Retrieved from World Food Programme: <https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-statement-yolanda-reponse-funds>

World Food Programme. (2014, June 25). *News WFP Executive Director Assesses Humanitarian Needs In Northern Iraq*. Retrieved from World Food Programme: <https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-executive-director-assesses-humanitarian-needs-northern-iraq>

World Food Programme. (2016, April 30). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/Public/documents/ep/WFP283607.pdf?_ga=2.61986860.1673290158.1544358130-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, March 24). *Emergency Dashboard - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp291252.pdf?_ga=2.124984458.1673290158.1544358130-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, January 30). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp290389.pdf?_ga=2.193785455.370682047.1543155751-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, December 29). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://docs.wfp.org/api/documents/af87d13bd2ce463cb0f7f92d79115200/download/?_ga=2.112881924.1499361926.1541505489-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, May 26). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp292101.pdf?_ga=2.26144383.370682047.1543155751-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, August 25). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp292826.pdf?_ga=2.38837729.370682047.1543155751-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2017, March 31). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp291324.pdf?_ga=2.239205123.1673290158.1544358130-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2018, January 18). *Emergency Dashboard - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme:

https://docs.wfp.org/api/documents/57b9f7c3f8864f3db111e3b9d5464095/download/?_ga=2.239783939.1673290158.1544358130-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2018, October 16). *Funding and donors* . Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/funding-and-donors>

World Food Programme. (2018, October 2). *History*. Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/history>

World Food Programme. (2018, October 2). *Overview of WFP*. Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/overview>

World Food Programme. (2018, November 27). *Private sector*. Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/private-sector>

World Food Programme. (2018, January 19). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://docs.wfp.org/api/documents/ab0e7c5fcbac46b183b0d36c34029e2e/download/?_ga=2.265176653.370682047.1543155751-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2018, March 3). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://docs.wfp.org/api/documents/8e3dfddcfdbb4fc382108465115e5fb6/download/?_ga=2.83386006.1499361926.1541505489-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2018, May 11). *Situation Report - South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: https://docs.wfp.org/api/documents/35919104d93c433cbe3145b18ccbd813/download/?_ga=2.203279059.370682047.1543155751-1972161428.1538578889

World Food Programme. (2018, October 3). *South Sudan emergency*. Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/emergencies/south-sudan-emergency>

World Food Programme. (2018, October 3). *Zero Hunger*. Retrieved from World Food Programme: <http://www1.wfp.org/zero-hunger>

World Food Programme. (2019, January 20). *South Sudan*. Retrieved from World Food Programme: <https://www1.wfp.org/countries/south-sudan>

Worldmeters. (2018, April 1). *South Sudan Population* . Retrieved from Worldmeters: <http://www.worldometers.info/world-population/south-sudan-population/>